

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP TERDAKWA DALAM KASUS PERKARA PIDANA
MEMALSUKAN SURAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst)**

Hiburan Zamasi *
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Panca Sarjana Putra,SH.MH**

ABSTRAK

Pemalsuan surat sering menjadi masalah hukum bagi pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum di Indonesia, bagaimana upaya proses tanggungjawab hukum kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara pemalsuan surat menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana menggunakan surat palsu dalam jual beli tanah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Upaya proses tanggungjawab hukum Kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat adalah melakukan upaya kasasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus memalsukan surat palsu dalam jual beli tanah adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti, sehingga membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Surat Palsu, Jual Beli Tanah.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**LEGAL ANALYSIS REGARDING THE APPLICATION OF EXCEPTIONAL
VERDICTS AGAINST DEFENDANTS IN CASE**

CRIMINAL FORGERY LETTER
(Case Study Case Number 157/Pid.B/2021/PN.Gst)

Hiburan Zamasi *
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Panca Sarjana Putra,SH.MH**

ABSTRACT

Forgery of letters often becomes a legal problem for irresponsible parties or individuals. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of the criminal act of forgery of letters according to Indonesian law, how the prosecutor's legal responsibility process is carried out in acquittal decisions in cases of forgery of letters, how the judge considers decisions in cases of forgery of letters according to the Gunungsitoli District Court Number 157/Pid.B /2021/PN.Gst).

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The regulations for criminal acts of counterfeiting that apply in Indonesia are contained in Chapters IX to Chapter XII of the Criminal Code (KUHP). Where the criminal act of forgery regulated in the Criminal Code does not only include forgery of a letter, but there are several types of criminal acts of forgery, one of which is the criminal act of using a forged document in buying and selling land, regulated in Article 263 paragraph (1) and is punishable by imprisonment at most. six years long. The Prosecutor's effort to process legal responsibility in acquittals in cases of document forgery is to carry out cassation efforts.

The results of the research show that the judge's consideration in handing down an acquittal in the case of falsifying fake documents in the sale and purchase of land was that the defendant had not been legally and convincingly proven because the element of making a fake letter or falsifying a letter as regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code was not proven, so it was acquitted. therefore, the defendant is dismissed from the indictment and restores the defendant's rights to his capacity, position and honor and dignity and orders the defendant to be released from detention.

Keywords: Free Decision, Fake Letter, Land Sale and Purchase.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

KATA PENGANTAR